

PERUBAHAN

**RENCANA KERJA
TAHUN 2025**



DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA,
DAN TRANSMIGRASI DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, Karena atas Limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 dapat terselesaikan.

Terbitnya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan acuan dan langkah awal dalam pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahunnya.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja yang disusun ini masih jauh dari kesempurnaan. Waktu, tenaga, pikiran dan kerja keras telah dicurahkan untuk terbitnya Rencana Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi serta sumbangsuhnya dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini.

Pangkajene Sidenreng, 15 Juli 2025

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,
KEPALA DINAS KOPERASI, UKM,
TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI



Dr. MUH. ROHADY RAMADHAN, S.I.P.M.Si.CGCAE

Pangkat : Pembina Utama Muda/IV c
NIP. 19710318 199101 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA S.D. TRIWULAN II TAHUN 2021.....	4
2.1. Evaluasi Renja PD sampai dengan Triwulan II Tahun 2020	4
2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	14
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	16
BAB IV P E N U T U P.....	24

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel II.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s.d. Triwulan II Tahun 2021	5
Tabel II.2 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah tahun 2021.....	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional dan Regional Provinsi Sulawesi Selatan. Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi merupakan salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang, yang melaksanakan Program dan Kegiatan dalam Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari koridor kebijakan Renstra yang saling berintegrasi satu dengan lainnya.

Sedangkan Rencana Kinerja pada Tahun 2025 bagi Unit Satuan Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi merupakan komitmen dan kontrak kerja yang harus dioptimalkan dalam proses pencapaian kinerjanya, sebagai bagian dari upaya pencapaian target kinerja, Rencana Strategis serta visi dan misi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang pada umumnya.

Dalam perkembangannya rencana kinerja yang telah disusun tidak tertutup kemungkinan untuk dilakukan perubahan. Perubahan ini dimaksudkan untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.2. Landasan Hukum

Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) yang dilaksanakan oleh setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) khususnya lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah diatur dalam peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) pada setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), dimaksudkan untuk mengevaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian perkembangan keadaan. Sedangkan tujuannya adalah untuk merumuskan capaian kinerja perangkat daerah yang disesuaikan dengan keadaan terkini dan diikuti penganggarannya.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I P E N D A H U L U A N

I.1. Latar Belakang

I.2. Landasan Hukum

I.3. Maksud dan Tujuan

I.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Renja PD Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV P E N U T U P

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Renja PD Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun 2024 dan capaian tahun berjalan (2025) sampai triwulan II sebagai bahan acuan untuk perubahan Rencana Kerja Tahun 2025. Dari hasil tersebut dapat terlihat program kegiatan yang telah mencapai target dan program kegiatan yang belum mencapai target.

Secara umum program kegiatan yang dilaksanakan beberapa telah mencapai target yang ditentukan, namun sebagian belum mencapai target. Hal ini disebabkan terjadinya pertanggungjawaban keuangan SKPD yang terlambat, dengan demikian akan mempengaruhi pelaksanaan renja sebagaimana telah ditetapkan pada awal perencanaan. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi seyogyanya ditempuh langkah-langkah strategis yakni dengan memberikan arahan serta memotivasi SDM agar dapat memacu serapan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan. Sebab lain adalah keuangan daerah yang terbatas sehingga program yang telah ditetapkan tidak dapat dianggarkan, demikian pulan program yang telah mendapat anggaran tidak dapat dilaksanakan akibat tidak tersedianya dana.

Target kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Tahun 2025 ini, menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja unit satuan kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi baik pada tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran kinerja/keberhasilan unit Satuan Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi yang dilakukan pada setiap akhir tahun kinerja.

Disamping itu adanya penyesuaian program berdasarkan Renstra yang telah ditetapkan sebagai acuan dalam menyusun program pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang diharapkan dapat meningkatkan capaian persentase pelaksanaan Renja SKPD pada tahun 2025. Sebagai bahan evaluasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II. 1 a

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI
DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERENKAT DAERAH S.D. TRIWULAN II 2025
KABUPATEN : SIDENRENG RAPPANG**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target capaian kinerja Program (Renstra SKPD) s.d. Tahun 2024 - 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan s.d. triwulan II tahun 2025			Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan RENSTRA SKPD s.d. tahun berjalan	
					Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan kegiatan s.d. tahun berjalan 2024 - 2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8=(7/6)</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	7,50	7,00	7,30	7,00	95,9%	7,00	93,33%
	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi yang diawasi	40,00	37,00	38,00	37,00	97,4%	37,00	92,50%

	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	30,00	20,00	25,00	20,00	80,0%	20,00	66,67%
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi aktif	10,67	10,65	10,66	10,65	99,9%	10,65	99,81%
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Kegiatan Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anggota koperasi yang dilatih	6,90	6,00	6,80	6,00	88,2%	6,00	86,96%
	Peningkatan Pemahaman dan PengetahuanSub keg Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	25,00	15,00	20,00	15,00	75,0%	15,00	60,00%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	60,00	50,00	55,00	50,00	90,9%	50,00	83,33%
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku	Persentase usaha mikro yang diberdayakan	1,25	1,20	1,25	1,20	96,0%	1,20	96,00%

	Kepentingan								
	Sub keg Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	25,00	10,00	25,00	10,00	40,0%	10,00	40,00%
	Sub keg Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	100,00	250,00	100,00	250,00	250,0%	250,00	250,00%
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro yang meningkat volume usahanya setelah difasilitasi pengembangan	3,50	2,50	3,00	2,50	83,3%	2,50	71,43%
	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase usaha mikro yang difasilitasi pengembangan	1,40	1,40	1,40	1,40	100,0%	1,40	100,00%
	Sub keg Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%	30,00	100,00%

	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	30,00	28,00	29,00	28,00	96,6%	28,00	93,33%
	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase pelaksanaan pelatihan	16,00	30,00	16,00	30,00	187,5%	30,00	187,50%
	Sub keg Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	330,00	630,00	330,00	630,00	190,9%	630,00	190,91%
	Sub Keg. Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	1,00	1,00	1,00	1,00	100,0%	1,00	100,00%
	Kegiatan Pemninaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Lembaga Pelatihan Swasta yang dibina	10,20	10,20	10,20	10,20	100,0%	10,20	100,00%
	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Swasta yang dibina	10,00	10,00	10,00	10,00	100,0%	10,00	100,00%
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah , dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)	4,60	4,50	4,55	4,50	98,9%	4,50	97,83%

	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Besaran pemeriksaan perusahaan	0,50	0,43	0,45	0,43	95,6%	0,43	86,00%
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	30,00	10,00	20,00	10,00	50,0%	10,00	33,33%
	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	28,50	28,00	28,20	28,00	99,3%	28,00	98,25%
	Sub keg Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	7.199,00	7.199,00	7.199,00	7.199,00	100,0%	7.199,00	100,00%
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase fasilitasi pembangunan kawasan transmigrasi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0%	100,00	100,00%
	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen kelayakan lingkungan dan pemukiman transmigrasi	20,00	15,00	20,00	15,00	75,0%	15,00	75,00%

	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	1,00	1,00	1,00	1,00	100,0%	1,00	100,00%
	sub keg Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	20,00	30,00	20,00	30,00	150,0%	30,00	150,00%
	sub keg Pelatihan transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	15,00	40,00	15,00	40,00	266,7%	40,00	266,67%
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase kawasan transmigrasi yg dikembangkan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0%	100,00	100,00%
	Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Satuan Permukiman yang dibina	4,00	4,00	4,00	4,00	100,0%	4,00	100,00%
	Sub keg Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	10,00	20,00	10,00	20,00	200,0%	20,00	200,00%
	Sub keg Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1,00	1,00	1,00	1,00	100,0%	1,00	100,00%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0%	100,00	100,00%

	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0%	100,00	100,00%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,00	3,00	3,00	3,00	100,0%	3,00	100,00%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,00	3,00	3,00	3,00	100,0%	3,00	100,00%
	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0%	100,00	100,00%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33,00	33,00	33,00	33,00	100,0%	33,00	100,00%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	230,00	200,00	230,00	200,00	87,0%	200,00	86,96%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	17,00	100,00%
	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0%	100,00	100,00%

	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	33,00	33,00	33,00	33,00	100,0%	33,00	100,00%
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	33,00	33,00	33,00	33,00	100,0%	33,00	100,00%
	Kegiatan:Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0%	100,00	100,00%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17,00	17,00	17,00	17,00	100,0%	17,00	100,00%
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	200,00	200,00	200,00	200,00	100,0%	200,00	100,00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65,00	15,00	60,00	15,00	25,0%	15,00	23,08%
	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0%	100,00	100,00%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4,00	1,00	4,00	1,00	25,0%	1,00	25,00%
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3,00	1,00	3,00	1,00	33,3%	1,00	33,33%

	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0%	100,00	100,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	12,00	12,00	12,00	100,0%	12,00	100,00%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12,00	12,00	12,00	12,00	100,0%	12,00	100,00%
	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0%	100,00	100,00%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12,00	12,00	12,00	12,00	100,0%	12,00	100,00%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18,00	15,00	18,00	15,00	83,3%	15,00	83,33%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1,00	1,00	1,00	1,00	100,0%	1,00	100,00%

Hingga triwulan II tahun 2025 umumnya sub kegiatan teknis belum memenuhi target, sedangkan kegiatan penunjang sudah sesuai target. Tidak terpenuhinya target capaian sub kegiatan teknis disebabkan oleh adanya efisiensi anggaran yang diberlakukan untuk tahun anggaran 2025, sehingga sub kegiatan tidak dapat dilaksanakan dengan rencana semula, diperlukan penyesuaian sub kegiatan agar dapat terlaksanakan sesuai anggaran yang tersedia.

- Implikasi yang timbul terhadap terget capaian program renstra PD

Target capaian program yang telah ditetapkan dalam renstra merupakan ukuran kesuksesan pembangunan yang direncanakan. Capaian target yang kurang mengakibatkan sektor tersebut kurang berkembang sesuai harapan dan perlu upaya selanjutnya untuk pencapaiannya atau diperlukan program yang lain untuk mengatasi capaian yang rendah.

Sedangkan target yang tercapai atau bahkan melampaui memberikan implikasi yang positif bagi keberhasilan program bersangkutan. Namun bukan berarti program tersebut patut dihentikan, masih perlu dilihat tantangan ke depan apakah program yang mencapai target masih diperlukan atau diganti dengan program yang lain.

- Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Kegagalan pencapaian target umumnya diakibatkan ketersediaan anggaran yang kurang. Oleh sebab itu perencanaan selanjutnya perlu dilakukan dengan arif. Pemilihan program dan penetapan target perlu mempertimbangkan ketersediaan anggaran.

Berikut kami sajikan indikator target yang harus dicapai pada tahun 2025

NO	Indikator Permendagri No 86	Satuan	Taget 2025
Aspek Kesejahteraan Masyarakat			
1	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	%	97
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	97.00

3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2.90
4	Rasio Penduduk Yang Bekerja	%	50
5	Laju Pertumbuhan Pdb Per Tenaga Kerja	%	7.00
6	Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas	%	60
7	Proporsi Tenaga Kerja Yang Berusaha Sendiri Dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja	%	50.00
8	Kontribusi Transmigrasi Terhadap PDRB	%	0.0071
Aspek Pelayanan Umum (Layanan Urusan Wajib Non Dasar)			
9	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	per 1000	0
10	Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	0
11	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	%	6.00
12	Keselamatan Dan Perlindungan	%	15.00
13	Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	%	20.00
14	Perselisihan Buruh Dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah	%	-
15	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	20
16	Besaran Pengujian Peralatan Di Perusahaan	%	0
17	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	5
18	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	%	100.00
19	Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan	%	100
20	Persentase Jumlah Tenaga Kerja Dibawah Umur	%	4
21	Persentase Koperasi Aktif	%	70
22	Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif	%	99
23	Persentase BPR/LKM Aktif	%	70
24	Persentase Usaha Mikro Dan Kecil	%	93.5
Layanan Urusan Pilihan			
25	Persentase Transmigran Swakarsa	%	1,5
	Indikator SDG's		

26	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	%	73
27	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	%	7
28	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	%	36.00
29	Persentase tenaga kerja formal.	%	35.00
30	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	%	36
31	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	%	5.00
32	Upah rata-rata per jam pekerja.	Rp	19000
33	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	%	2.0 0.04
34	Tingkat setengah pengangguran.	%	12.00
35	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	%	10
36	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	orang	1250
37	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	%	20.00
38	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	%	30.00
39	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	%	20
40	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Rp jt	10
Indikator IUP RPJPD			
41	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan	%	97
42	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	20.00
43	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	%	
44	Penyediaan Akomodasi dan Makan minum	%	1.1
45	Persentase koperasi sehat di kab/kota	%	63
46	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2.90
47	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	95
48	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	97

	I K U		
49	Tingkat partisipasi angkatan kerja	persen	97
50	Tingkat produktivitas tenaga kerja	persen	7,3
51	Pertumbuhan rata-rata Produksi koperasi dan UMKM	persen	1
52	Rata-rata produktivitas Koperasi dan UMKM	Rp Juta per tahun	3222
53	Persentase peningkatan sarana/prasarana di wilayah transmigrasi	persen	7
54	nilai saki p PD	Kategori	B
	I K K		
55	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja	persen	0
56	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	orang	670
57	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kab.	persen	16.4
58	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKSBipartit, Struktur Skala Upah , dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)	persen	4.7
59	Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	persen	20
60	Persentase koperasi yang diawasi	persen	75
61	Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pendampingan Kelembagaan Dan Usaha Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kab.	persen	73.68
62	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	persen	17
63	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	unit	20
64	Persentase perencanaan kawasan transmigrasi	persen	0
65	Jumlah KK yang difasilitasi penempatannya	KK	0

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Saat ini kondisi perekonomian global dilanda ketidakpastian, hal mempengaruhi kondisi negara kita. Geopolitik menjadi faktor penting yang mempengaruhi kondisi ekonomi makro suatu negara, termasuk Indonesia. Kondisi atau kejadian yang dialami suatu negara akan mempengaruhi negara yang lainnya

melalui transmisi kegiatan ekspor dan impor. Dampak terhadap tekanan harga yang lebih tidak terduga adalah jika teori ekspektasi rasional terjadi dalam kasus perang Rusia-Ukraina dan Timur Tengah. Teori tersebut menjelaskan jika para pelaku ekonomi atau seluruh masyarakat mengetahui dampak yang akan timbul dari suatu kebijakan atau peristiwa yang sedang terjadi, mereka akan memberikan respon masif yang tidak dapat terkendali.

Strategi pertama yang diambil adalah penanganan residu pandemi dengan cermat. Pemerintah melakukan upaya maksimal untuk mengatasi dampak kesehatan dan ekonomi yang ditinggalkan. Kedua, pemerintah menyalurkan bantuan sosial dengan efisien untuk memastikan tidak ada warga yang kelaparan, dan memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan kepada mereka yang terdampak secara ekonomi. Ketiga, pemerintah menjaga peran dari sektor koperasi, UMKM, dan korporasi dalam pemulihan ekonomi. Pemerintah harus memastikan bahwa tidak ada dari entitas bisnis ini yang gagal karena krisis.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan evaluasi rencana kerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dirumuskan rencana kerja dan pendanaan yang akan dituangkan dalam rencana kerja perupahan anggaran yang selanjutnya dijadikan dokumen pelaksanaan perubahan anggaran tahun anggaran 2025.

Rencana kerja ini memuat 9 program, 17 kegiatan, dan 30 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 17.470.496.000.

Tabel III.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2025
DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN ANGGARAN 2025								
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				6.096.627.727					17.470.496.000	
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	Kab Sidrap	7,00	20.000.000	Anggota koperasi	Kab Sidrap	9,00	119.000.000	Anggota koperasi	
	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi yang diawasi	Kab Sidrap	37,00	20.000.000	Anggota koperasi	Kab Sidrap	39,00	119.000.000	Anggota koperasi	
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta	Kab Sidrap	20,00	20.000.000	Anggota koperasi	Kab Sidrap	30,00	119.000.000	Anggota koperasi	

		Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota								
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi aktif	Kab Sidrap	10,65	15.000.000	Anggota koperasi	Kab Sidrap	10,65	15.000.000	Anggota koperasi
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Kegiatan Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anggota koperasi yang dilatih	Kab Sidrap	6,00	15.000.000	Anggota koperasi	Kab Sidrap	6,00	15.000.000	Anggota koperasi
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Sub keg Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Kab Sidrap	15,00	15.000.000,00	Anggota koperasi	Kab Sidrap	20,00	15.000.000	Anggota koperasi
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	Kab Sidrap	50,00	305.000.000	Usaha mikro dan kecil	Kab Sidrap	50,00	1.320.000.000	Usaha mikro dan kecil
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase usaha mikro yang diberdayakan	Kab Sidrap	1,20	305.000.000	Usaha mikro dan kecil	Kab Sidrap	1,20	1.320.000.000	Usaha mikro dan kecil

	Sub keg Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Kab Sidrap	10,00	55.000.000	Usaha mikro dan kecil	Kab Sidrap	30,00	1.270.000.000	Usaha mikro dan kecil
	Sub keg Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Kab Sidrap	250,00	250.000.000	Usaha mikro dan kecil	Kab Sidrap	100,00	50.000.000	Usaha mikro dan kecil
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro yang meningkat volume usahanya setelah difasilitasi pengembangan	Kab Sidrap	2,50	375.084.000	Usaha mikro dan kecil	Kab Sidrap	2,51	381.000.000	Usaha mikro dan kecil
	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase usaha mikro yang difasilitasi pengembangan	Kab Sidrap	1,40	375.084.000	Usaha mikro dan kecil	Kab Sidrap	1,41	381.000.000	Usaha mikro dan kecil
	Sub keg Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kab Sidrap	19,00	375.084.000	Usaha mikro dan kecil	Kab Sidrap	20,00	381.000.000	Usaha mikro dan kecil
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Kab Sidrap	28,00	1.004.685.000	Pencari kerja	Kab Sidrap	29,00	10.220.512.000	Pencari kerja

	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase pelaksanaan pelatihan	Kab Sidrap	30,00	604.685.000	Pencari kerja	Kab Sidrap	40,00	10.220.512.000	Pencari kerja
	Sub keg Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Kab Sidrap	630,00	554.685.000	Pencari kerja	Kab Sidrap	859,00	10.000.000.000	Pencari kerja
	Sub Keg. Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Kab Sidrap	1,00	50.000.000	Pencari kerja	Kab Sidrap	55,00	220.512.000	Pencari kerja
	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Lembaga Pelatihan Swasta yang dibina	Kab Sidrap	10,20	400.000.000	Pekerja/ buruh	Kab Sidrap	-	-	Pekerja/ buruh
	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Swasta yang dibina	Kab Sidrap	10,00	400.000.000	Pekerja/ buruh	Kab Sidrap	-	-	Pekerja/ buruh
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan)	Kab Sidrap	4,50	1.259.453.000	Pekerja/ buruh	Kab Sidrap	4,52	1.703.200.000	Pekerja/ buruh
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah	Besaran pemeriksaan perusahaan	Kab Sidrap	0,43	10.000.000	Pekerja/ buruh	Kab Sidrap	0,40	3.200.000	Pekerja/ buruh

	Kabupaten/Kota									
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Kab Sidrap	10,00	10.000.000,00	Pekerja/buruh	Kab Sidrap	1,00	3.200.000	Pekerja/buruh
	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	Kab Sidrap	28,00	1.249.453.000	Transmigran	Kab Sidrap	30,00	1.700.000.000	Transmigran
	Sub keg Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab Sidrap	7.199	1.249.453.000	Transmigran	Kab Sidrap	9.381	1.700.000.000	Transmigran
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase fasilitasi pembangunan kawasan transmigrasi	Kab Sidrap	100,00	80.000.000	Transmigran	Kab Sidrap	100,00	31.000.000	Transmigran
	Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah	Persentase dokumen kelayakan lingkungan dan pemukiman	Kab Sidrap	15,00	80.000.000	Transmigran	Kab Sidrap	5,00	31.000.000	Transmigran

	Kabupaten/Kota	transmigrasi								
	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	Kab Sidrap	1,00		Transmigran	Kab Sidrap	-		Transmigran
	sub keg Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	Kab Sidrap	50,00	30.000.000	Transmigran	Kab Sidrap	50,00	15.500.000	Transmigran
	sub keg Pelatihan transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Kab Sidrap	50,00	50.000.000	Diskopnakerans	Kab Sidrap	50,00	15.500.000	Diskopnakerans
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase kawasan transmigrasi yg dikembangkan	Kab Sidrap	100,00	30.000.000	Diskopnakerans	Kab Sidrap	-	117.000.000	Diskopnakerans
	Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Satuan Permukiman yang dibina	Kab Sidrap	4,00	30.000.000	Diskopnakerans	Kab Sidrap	-	117.000.000	Diskopnakerans
	Sub keg Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	Kab Sidrap	20,00	20.000.000,00	Diskopnakerans	Kab Sidrap	-	-	Diskopnakerans
	Sub keg Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Kab Sidrap	1,00	10.000.000,00	Diskopnakerans	Kab Sidrap	1,00	117.000.000	Diskopnakerans

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Sidrap	100,00	3.007.405.727	Diskopnakerans	Kab Sidrap	100,00	3.563.784.000	Diskopnakerans
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Sidrap	100,00	8.000.000	Diskopnakerans	Kab Sidrap	100,00	11.200.000	Diskopnakerans
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Sidrap	3,00	5.000.000	Diskopnakerans	Kab Sidrap	3,00	5.800.000	Diskopnakerans
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Sidrap	3,00	3.000.000	Diskopnakerans	Kab Sidrap	3,00	5.400.000	Diskopnakerans
	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab Sidrap	100,00	2.726.835.727	Diskopnakerans	Kab Sidrap	100,00	2.964.084.000	Diskopnakerans
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang bulan yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Sidrap	400,00	2.718.835.727	Diskopnakerans	Kab Sidrap	420,00	2.955.224.000	Diskopnakerans
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab Sidrap	200,00	5.000.000	Diskopnakerans	Kab Sidrap	230,00	5.660.000	Diskopnakerans
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	Kab Sidrap	17,00	3.000.000	Diskopnakerans	Kab Sidrap	17,00	3.200.000	Diskopnakerans

		Semesteran SKPD								
	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab Sidrap	100,00	7.000.000	Diskopnakerans	Kab Sidrap	100,00	4.800.000	Diskopnakerans
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab Sidrap	33,00	4.000.000	Diskopnakerans	Kab Sidrap	28,00	2.400.000	Diskopnakerans
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab Sidrap	33,00	3.000.000	Diskopnakerans	Kab Sidrap	28,00	2.400.000	Diskopnakerans
	Kegiatan:Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab Sidrap	100,00	32.000.000	Diskopnakerans	Kab Sidrap	100,00	206.500.000	Diskopnakerans
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab Sidrap	10,00	1.500.000	Diskopnakerans	Kab Sidrap	10,00	1.500.000	Diskopnakerans
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab Sidrap	200,00	4.000.000	Diskopnakerans	Kab Sidrap dan luar Sidrap	350,00	5.000.000	Diskopnakerans
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Sidrap	15,00	26.500.000	Diskopnakerans	Kab Sidrap	80,00	200.000.000	Diskopnakerans
	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Kab Sidrap	100,00	10.000.000	Diskopnakerans	Kab Sidrap	100,00	39.000.000	Diskopnakerans

		Daerah								
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab Sidrap	1,00	5.000.000	Diskopnakerans	Kab Sidrap	3,00	31.000.000	Diskopnakerans
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab Sidrap	1,00	5.000.000	Diskopnakerans	Kab Sidrap	2,00	8.000.000	Diskopnakerans
	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kab Sidrap	100,00	137.400.000	Diskopnakerans	Kab Sidrap	100,00	204.000.000	Diskopnakerans
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab Sidrap	12,00	45.400.000	Diskopnakerans	Kab Sidrap	36,00	101.000.000	Diskopnakerans
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab Sidrap	12,00	92.000.000	Diskopnakerans	Kab Sidrap	12,00	103.000.000	Diskopnakerans
	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab Sidrap	100,00	86.170.000	Diskopnakerans	Kab Sidrap	100,00	134.200.000	Diskopnakerans
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab Sidrap	12,00	66.170.000	Diskopnakerans	Kab Sidrap	12,00	69.200.000	Diskopnakerans
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab Sidrap	15,00	10.000.000	Diskopnakerans	Kab Sidrap	11,00	5.000.000	Diskopnakerans

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab Sidrap	1,00	10.000.000	Diskopnakers	Kab Sidrap	1,00	60.000.000	Diskopnakers
--	--------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	------------	------	------------	--------------	------------	------	------------	--------------

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan ini disusun berdasarkan Referensi (Undang-Undang/Peraturan), Renstra, dan keterpaduan Top Down Planning (Konsultatif) dan Bottom Up Planning (Definitif) melalui Musrenbang dan Kebutuhan Organisasi sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang serta memperhatikan kondisi terakhir yang dihadapi OPD.

Dalam rangka pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, ketenagakerjaan dan transmigrasi di Kabupaten Sidenreng Rappang, maka dalam pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi perlu mendapat perhatian khusus jika sekiranya ketersediaan anggaran cukup demi untuk pelaksanaan Program/kegiatan/sub kegiatan tahun 2025.

Demikianlah Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi disusun sebagai acuan aparat dalam pelaksanaan Program/Kegiatan/sub kegiatan untuk mencapai tujuan bersama.

Pangkajene Sidenreng, 15 Juli 2025

KEPALA DINAS KOPERASI, UKM,
TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,



Dr. MUH. ROHADY RAMADHAN, S.I.P.M.Si.CGCAE

Pangkat : Pembina Utama Muda/IV c
NIP. 19710318 199101 1 003